

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan merupakan sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal saat ini. Keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara di dalam negara demokrasi adalah hal yang sangat penting karena rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi (Gatara, 2009: 251).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Hal tersebut terbukti sejak seluruh masyarakat Indonesia memilih Soekarno dan Hatta sebagai wakil yang diamanatkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Rakyat bebas mengemukakan pendapat dan mengutarakan keinginannya demi terwujudnya masyarakat yang partisipatif (Sahdan, 2004: 7). Indonesia mendukung kebebasan rakyat dalam berpendapat dengan memberikan wadah yang dapat menampung aspirasi dan menjadi alat penghubung antara pemimpin dengan yang dikenal dengan sebutan partai politik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Partai politik merupakan suatu wadah yang diisi oleh sekumpulan atau beberapa kelompok yang memiliki tujuan yaitu memperoleh kekuasaan dan ideologi yang sama. Partai politik dalam proses pencapaian tujuannya memiliki peranan dan fungsi yang jelas dan terperinci sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh partai politik itu sendiri.

Menurut Gaffar dan Amal (Efriza, 2012: 226), partai politik memiliki fungsi-fungsi dan peranan yaitu, sebagai pendidikan politik, sebagai sumber rekrutmen, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa fungsi partai politik diantaranya adalah pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi partai politik yaitu 1) sebagai sumber rekrutmen yaitu partai dituntut untuk pandai memilih calon-calon yang akan dijadikan anggota partai politik maupun yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif, 2) dapat menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kebijakan

yang mereka buat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, 3) sebagai penghubung antara penguasa dan rakyatnya, dan 4) melakukan pendidikan politik.

Fungsi pendidikan politik di sebuah partai merupakan suatu upaya maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik dalam membangun dan membentuk masyarakat yang sadar politik dan dapat berpartisipasi di proses kehidupan politik khususnya dalam pemilihan umum. Menurut Kartono (2009: 68) pendidikan politik berfungsi agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses politik, pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. Partai politik tersebut dapat mengajak masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang sadar memilih dan membentuk serta memperluas pola fikir masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal dan mengetahui latar belakang calon kandidat maupun tujuan nyata yang dijanjikan oleh mereka sehingga dapat dipastikan mereka tidak melanggar perjanjian tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu dari 12 partai yang akan mengikuti pemilihan calon anggota legislatif di Kota Metro. PKS juga merupakan salah satu partai kuat yang menjadi pesaing bagi partai lain dalam proses pemilihan umum. PKS bermula dari gerakan sosial yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan politik (Muhtadi, 2012: 31).

PKS memiliki daya tarik tersendiri dan penilaian yang lain diantara partai-partai lainnya di mata masyarakat umum. Pendidikan politik pada PKS merupakan upaya yang dilakukan oleh pengurus partai, anggota partai maupun calon kader partai untuk dapat ikut berkontribusi menyadarkan masyarakat

akan pentingnya pengetahuan tentang politik dan kesediaan diri untuk menggunakan hak pilih tanpa adanya paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang luar sehingga masyarakat berani mempertanggungjawabkan hak pilihnya. Pendidikan politik merupakan salah satu dari beberapa program kerja yang dilakukan oleh PKS dengan cara mengadakan sosialisasi, pengajian dan dakwah di berbagai wilayah lingkup dan kalangan usia masyarakatnya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dari tanggal 19 Februari –19 Maret 2014, diketahui bahwa masyarakat khususnya yang berada di kawasan Kota Metro masih kurang mengetahui secara rinci visi dan misi calon kandidat yang akan mereka pilih. Masyarakat cenderung memilih calon berdasarkan hubungan kekerabatan maupun paksaan dari sekelompok orang tertentu. Masyarakat menganggap bahwa proses memilih calon pemimpin khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidaklah penting, karena menurut mereka siapapun yang akan menduduki jabatan DPRD tidak akan berpengaruh banyak terhadap kehidupan maupun kesejahteraan mereka.

Tahun 2014 merupakan tahun politik dimana masyarakat Kota Metro akan menggunakan hak suaranya dengan memilih calon-calon baik anggota legislatif maupun eksekutif. Calon-calon ini lah yang akan membentuk Kota Metro untuk lima tahun berikutnya. Untuk mendapatkan calon anggota DPRD yang memiliki sifat kepemimpinan dan rasional diperlukan masyarakat yang mampu memilih calon-calon unggulannya dengan rasional dan tanpa doktrin dari berbagai kalangan.

Mobilisasi merupakan bentuk dan cara orang maupun kelompok yang berkuasa untuk menekan (*pressure group*) yang dikuasai agar patuh dan menuruti apa yang diinginkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa perlu adanya penjelasan kenapa harus dipatuhi (Gatara, 2009: 308). PKS dapat dikatakan salah satu partai yang rutin dalam mengadakan acara-acara informal yang berkaitan terhadap masyarakat setempat. Keberadaan PKS di tengah masyarakat juga lebih sering muncul walaupun tidak pada masa kampanye atau pemilihan umum.

Pendidikan politik diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memilih secara profesional dan selektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih karena tujuan dari pendidikan politik antara lain adalah membangkitkan kesadaran warga negara akan hak politiknya terutama dalam mengikuti proses pemilihan umum, dengan menggunakan hak suara secara bebas dan mengajarkan seseorang untuk mewujudkan negara yang menganut sistem demokrasi.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro perlu diteliti mengingat kecilnya perolehan suara yang diperoleh oleh PKS pada tahun 2009 dan PKS hanya memperoleh 1 kursi suara di DPRD Kota Metro (Data KPU Kota Metro 2004 dan 2009), meskipun PKS telah gencar melakukan pendidikan politik. Pada pemilu legislatif di tahun 2014 PKS juga gencar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Hal yang dianggap menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS melalui kegiatan-kegiatan

sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memilih atau hanya untuk menarik simpati masyarakat saja tanpa memperhatikan makna sesungguhnya dari pendidikan politik. Oleh sebab itu penelitian ini penting agar dapat mengetahui fungsi pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditunjukkan untuk masyarakat Kota Metro pada Pemilu 2014.

Ada beberapa penelitian lain berupa skripsi dan jurnal mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang pendidikan politik. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah :

1. Skripsi Arie Sunandar tahun 2013 dengan judul “ Fungsi Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Di Kota Tanjungpinang” *Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.*

Perbedaan skripsi Arie Sunandar dengan penelitian ini adalah, pertama skripsi ini membahas tentang kurangnya partisipasi masyarakat dan kader Golkar Kota Tanjungpinang untuk ikut serta dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik, sebagian masyarakat enggan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut yang dianggap tidak penting sehingga hanya membuang waktu dan tenaga mereka (Sunandar, 2013: 2). Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro ke masyarakat pada tahun 2014.

Kedua, teori yang digunakan dalam skripsi Arie Sunandar adalah teori partai politik secara umum dari Budiarto (2013: 3) menjelaskan bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama dan teori pendidikan politik oleh Kartini Kartono (2013: 3) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikan aktivitas sosial dan membangun kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara (Sunandar, 2013: 4).

Penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Hayer didalam buku Kartono yang menjelaskan tentang unsur pendidikan politik yang meliputi unsur pengenalan, unsur pemahaman, unsur berfikir secara kritis, unsur menentukan sikap, dan unsur merubah sikap.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Arie Sunandar dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Akan tetapi ada perbandingan yang dilakukan terhadap variabel mandiri dengan menggabungkan variabel lainnya, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2. Skripsi Meutia Aulia tahun 2013 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Masyarakat Oleh Partai Amanat Nasional ( Studi Kasus di DPD PAN Kota Bandar Lampung” *Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung*.

Perbedaan skripsi Meutia Aulia dengan penelitian ini adalah, pertama skripsi ini membahas tentang Partai Amanat Nasional telah menganggarkan subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pendidikan politik dan PAN telah menganggarkan dana untuk pendidikan politik paling besar dari delapan partai lainnya yang mendapat subsidi.

PAN menganggarkan dana untuk pendidikan politik sebesar Rp 67 juta bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh PAN dalam melakukan pendidikan politik dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut. (Aulia, 2013: 8). Penelitian ini masalah yang diteliti adalah pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro ke masyarakat pada tahun 2014

Kedua, teori yang digunakan dalam skripsi Meutia Aulia adalah teori Menurut Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg terdapat 3 (tiga) fungsi partai politik dari setiap bagian yaitu fungsi partai *electorat* yang meliputi menyederhanakan pemilihan bagi pemilih, pendidikan warga negara, membangkitkan simbol identitas dan loyalitas serta memobilisasikan rakyat untuk berpartisipasi (Meutia, 2013: 19).

Penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Hayer didalam buku Kartono yang menjelaskan tentang unsur pendidikan politik yang meliputi unsur pengenalan, unsur pemahaman, unsur berfikir secara kritis, unsur menentukan sikap, dan unsur merubah sikap.



Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Meutia Aulia dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

3. Jurnal Pendidikan Politik Yunizir Djakfar tahun 2009 dengan judul “Pendidikan Politik Warga Negara Dalam Menciptakan Demokrasi Yang Berkualitas”

Perbedaan tulisan Yunizir Djakfar dengan penelitian ini adalah, pertama tulisan ini membahas tentang perbedaan pola pendidikan pada negara-negara penganut sistem totaliter akan berbeda dengan pola pendidikan pada negara-negara penganut sistem demokrasi. Demikian pula tujuannya pun akan merupakan perbedaan berbanding terbalik antara kedua pola tersebut. Pelestarian sistem nilai atau politik, maka pendidikan politik merupakan salah satu upaya selain upaya lainnya yang merupakan aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk perilaku.

Penelitian ini masalah yang diteliti adalah pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro ke masyarakat pada tahun 2014

Kedua, teori yang digunakan dalam tulisan Yunizir Djakfar adalah teori dari seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992) “pendidikan/sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan

persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perception and their reactions to political phenomena*). Penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Hayer didalam buku Kartono yang menjelaskan tentang unsur pendidikan politik.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan Yunizar Djakfar adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara global. Penelitian ini hanya menggunakan wawancara dan penelitian pustaka.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro pada Pemilihan Umum 2014?”.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditunjukkan untuk masyarakat Kota Metro pada Pemilu 2014.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui fungsi pendidikan politik PKS pada Pemilihan Umum 2014.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang pelaksanaan fungsi pendidikan politik PKS pada Pemilihan Umum 2014.